

ABSTRAK

Kasus pemberian imbal jasa atas rujukan bidan pada praktik lapangan disebut sebagai gratifikasi rujukan. Pertanyaan muncul karena pada dasarnya pemberian imbal jasa pada kasus bersifat transaksional yang merupakan ciri khas dari suap. Sifat transaksional merupakan penanda adanya *meeting of mind* yang menjadi pembeda suap dari gratifikasi. Selain itu, bidan sebagai subjek di dalam kasus ini belum tentu berkualifikasi sebagai pegawai negeri. Hal ini akan menghambat penerapan pasal-pasal suap dalam UU PTPK karena pasal-pasal tersebut hanya dapat diterapkan untuk pelaku yang berkualifikasi pegawai negeri. Penerapan Pasal UU TPS pada dasarnya dapat dilakukan. Namun, dalam kondisi rujukan yang diberikan bidan sesuai dengan keperluan/kepentingan pasien akan sulit membuktikan unsur berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini didasarkan pada dua rumusan masalah, yaitu (1) apakah pasal suap dapat diterapkan dalam pemberian imbal jasa atas rujukan bidan dan (2) apakah urgensi hadirnya konsep suap di sektor swasta dalam pemberian imbal jasa atas rujukan bidan. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) pasal suap dapat diterapkan dalam kasus pemberian imbal jasa atas rujukan bidan dan (2) urgensi hadirnya konsep swasta dalam kasus ini didasarkan pada tiga argumen, yaitu (i) mengenai adanya bidan swasta, (ii) sulitnya penerapan UU TPS terhadap bidan swasta di kondisi rujukan sesuai dengan kepentingan/keperluan pasien, dan (iii) sektor kesehatan merupakan sektor publik yang mengalami privatisasi.

Kata kunci: imbal jasa, rujukan bidan, gratifikasi, suap.

ABSTRACT

Fees on midwife's referral letter case often called as a referral gratification. The question arises because basically the fees in the case is transactional by nature that is the unique characteristic of bribery. The transactional character shows that there is a meeting of mind - a differential factor of bribery and gratification. Furthermore, the midwife in this case is not always qualified as a civil servant. This fact will hinder the use of bribery articles in UU PTPK because the articles stated civil servant as the subject. Basically, UU TPS can be applied, but in the condition when the referral letter meets the needs of the patient, it is really hard to prove the element 'contradicting with the duties'. Based on these problems, issues to be discussed in this research are (1) whether the articles of bribery applicable in the case and (2) what is the urgency of the private bribery concept in the case. This research is doctrinal research with the statute and conceptual approach. The conclusions are (1) the articles of bribery can be applied in the case and (2) the urgency of private bribery concept in the case is based on three arguments, i.e. (i) there is non-civil servant midwife, (ii) difficulty in applying UU TPS in the conditions when the referral letter meets the needs of the patient, and (iii) health sector is a public sector that runs into privatization.

Keyword: payment, midwife's referral letter, gratification, bribery.